

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengambilan keputusan merupakan hal penting yang perlu dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pengambilan keputusan telah menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab bagi setiap manajemen Pemerintah Daerah. Pengambilan keputusan menyangkut pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah (Amalia, 2015). Dengan demikian, keputusan yang diambil pihak manajemen Pemerintah Daerah haruslah merupakan keputusan yang berkualitas.

Pengambilan keputusan yang berkualitas dikaitkan dengan dua keadaan (sesuai dengan pandangan disiplin perilaku organisasi) : pertama, kualitas pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi mekanisme pencapaian tujuan pribadi, seperti kesejahteraan, karier, kepuasan kerja, dan lain-lain. Kedua pengambilan keputusan yang memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan sosial, tujuan organisasi atau tujuan bersama. Seluruh konsep, metode, teori, serta teknik yang terdapat dalam ilmu manajemen pada akhirnya akan ditunjukkan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang terbaik. Keputusan yang diambil pengelola organisasi akan mendorong organisasi dalam mencapai tujuannya (Dermawan, 2016 : 6).

Akan tetapi, suatu keputusan tidak akan memiliki tingkat keakuratan yang baik jika tidak didukung berbagai informasi yang ada. Sebab, salah satu komponen terpenting dari proses pengambilan keputusan adalah kegiatan pengumpulan informasi (Amalia, 2015).

Di lingkungan pemerintah daerah, salah satu sumber informasi relevan yang dapat digunakan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan yakni informasi akuntansi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas dan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP BA).

Menurut PP No. 71 tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa komponen, yakni : 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan Operasional (LO); 4) Laporan Arus Kas (LAK); 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sementara itu, menurut PP No. 24 tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa komponen, yakni : 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan Arus Kas; dan 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan pertimbangan keterbatasan data dan informasi, maka PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Kas Menuju Akrual yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari : Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna internal dan eksternal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan (Tanjung, 2016).

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pun merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang menggunakan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas sebagai salah satu sumber informasi relevan yang dapat digunakan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Sebagai organisasi pemerintahan, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas pokok yakni membantu gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesejahteraan sosial. Demi menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka kegiatan manajemen yang salah satunya adalah pengambilan keputusan yang

didasarkan pada informasi laporan keuangan pemerintah daerah menjadi hal penting yang harus perlu dilakukan oleh dinas sosial tersebut.

Adapun data tentang informasi laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Kas Menuju Akrua, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Berikut disajikan laporan keuangan tersebut berdasarkan Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Uraian	Tahun 2016				Tahun 2015			
	Jumlah		+/-		Jumlah		+/-	
	Anggaran	Realisasi	Rp	%	Anggaran	Realisasi	Rp	%
Pendapatan Daerah	700.000.000	607.154.500	(92.845.500)	86,74	400.000.000	473.718.000	73.718.000	118,43
Belanja Daerah	43.789.076.000	43.333.025.553	(456.050.447)	98,96	44.071.134.000	42.880.239.328	(1.190.894.672)	97,3
Surplus/Defisit	(43.089.076.000)	(42.725.871.053)	363.204.947	99,16	(43.671.134.000)	(42.406.521.328)	1.264.612.672	97,1

Sumber : Data Sekunder, 2017

Tabel 1.2
Ringkasan Laporan Operasional
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Uraian	2016	Kenaikan/ Penurunan	%	2015	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan LO	607.154.500	607.154.500	100	473.718.000	473.718.000	100
Belanja LO	43.804.003.362	43.804.003.362	100	40.425.836.923	40.425.836.923	100
Surplus/Defisit	(43.196.848.862)	(43.196.848.862)	100	(39.952.118.923)	(39.952.118.923)	100

Sumber : Data Sekunder, 2017

Tabel 1.3
Ringkasan Neraca
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Uraian	2016	2015
Aset	62.127.760.360,80	65.248.166.752,00
Ekuitas & Kewajiban	62.127.760.360,80	65.248.166.752,00

Sumber : Data Sekunder, 2017

Tabel 1.4
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Uraian	2016		2015	
	Rp	2015	Rp	2014
EKUITAS AWAL	70.091.717.680,80	70.091.717.680,80	54.594.043.250	54.594.043.250
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN ATAU KESALAHAN MENDASAR	0	0	8.206.408.689	0
RK PPKD	42.725.871.053,00	0	42.399.833.736	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN ATAU KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0
<i>Surplus/Defisit LO</i>	(43.196.848.862)	0	(39.952.118.923)	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN ATAU KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	(4.446.912)	0	0	0
Koreksi Nilai Aset (Koreksi Kurang/Lebih Catat)	(7.488.532.599)	0	0	0
JUMLAH EKUITAS AKHIR	62.127.760.360,80	70.091.717.680,80	65.248.166.752	54.594.043.250

Sumber : Data Sekunder, 2017

Lebih lanjut, beberapa ringkasan laporan keuangan yang ada tersebut menyajikan informasi penting, yang salah satunya dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Akan tetapi, apakah manfaat riil laporan keuangan tersebut terhadap pengambilan keputusan di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dapat diketahui. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Manfaat Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengambilan Keputusan Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana manfaat informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang merupakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap pengambilan keputusan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah pemahaman penulis tentang manfaat informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan tambahan referensi dalam mengetahui manfaat informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah untuk pengambilan keputusan.

c. Bagi Universitas

Bagi Universitas bahan untuk pengayaan ilmu-ilmu yang telah diterima pada saat perkuliahan.